

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**TAHUN 2023**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati untuk lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang-saran positif dari berbagai pihak.

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bukanlah merupakan hasil kerja perorangan, kasi maupun sekretariat semata. Namun semua ini merupakan hasil dari dukungan dan kerjasama yang selalu terbina baik di kalangan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dengan seluruh unsur pemangku kepentingan.

Kedepan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok akan berusaha untuk terus meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan transparansi dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas-tugas lainnya.

Arosuka, Februari 2024  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN SOLOK



**DONLY WANCE LUBIS, SSTP**  
NIP. 19650805 199308 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan agenda yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023, sehingga data dan fakta ketercapaian target secara objektif dan jujur, sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang memenuhi kajian masyarakat yaitu Clean Governmet dan Good Government.

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok yaitu ” ***Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dalam membangun Masyarakat Kabupaten Solok yang Demokratis dan Berwawasan Kebangsaan***”

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2022 telah merencanakan dan melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (performance result) tahun 2023 dengan rencana kerja (performance plan) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran dengan 6 (enam)

indikator penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berhasil mencapai sasaran strategis lebih dari 97.82 % (dengan klasifikasi pengukuran/penilaian : Sangat Baik)”

Berbagai keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok tersebut akan lebih ditingkatkan untuk masa yang akan datang dan terhadap kelemahan/hambatan, yang terjadi akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

# **SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/isu-isu strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **a. CAPAIAN KINERJA**

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap IKU

### **b. REALISASI ANGGARAN**

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>I</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>ii</b>
<b>Sistematika Penyajian .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
a. Gambaran Umum .....	1
b. Fungsi dan Tugas Pokok .....	4
c. Struktur Organisasi dan Sumber Daya .....	6
d. Isu Strategis .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>10</b>
a. Rencana Strategis (Renstra) .....	10
b. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....	12
c. Perjanjian Kinerja .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>24</b>
a. Capaian Kinerja .....	24
b. Realisasi Anggaran .....	73
<b>BAB IV PENUTUPAN</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

1.1	Nama-nama Pegawai pada Badan Kesbangpol Tahun 2023	I	7
2.1	Penetapan Kinerja Tahun 2023	II	13
2.2	Penetapan Kinerja Setelah Perubahan Anggaran Tahun 2023	II	16
2.3	Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2023	II	20
2.4	Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2023	II	21
3.1	IKU 1	III	24
3.2	Perkembangan IKU 1	III	25
3.1.1	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015	III	26
3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Provinsi	III	27
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kabupaten	III	28
3.1.4	Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Target Kinerja	III	31
3.3	IKU 2	III	34
3.4	Perkembangan IKU 2	III	34
3.2.1	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015	III	35
3.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Provinsi	III	37
3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kabupaten	III	37
3.2.4	Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Target Kinerja	III	40
3.5	IKU 3	III	41
3.6	Perkembangan IKU 3	III	42
3.3.1	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015	III	43
3.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam	III	44

dokumen Renstra Provinsi		
3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kabupaten	III	45
3.3.4 Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Target Kinerja	III	48
3.7 IKU 4	III	50
3.8 Perkembangan IKU 4	III	51
3.4.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015	III	52
3.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Provinsi	III	53
3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kabupaten	III	54
3.4.4 Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Target Kinerja	III	56
3.9 IKU 5	III	58
3.10 Perkembangan IKU 5	III	58
3.5.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015	III	59
3.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Provinsi	III	61
3.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kabupaten	III	61
3.5.4 Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Target Kinerja	III	64
3.11 IKU 6	III	66
3.12 Perkembangan IKU 6	III	66
3.6.1 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015	III	67
3.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Provinsi	III	68



3.6.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kabupaten	III	69
3.6.4	Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Target Kinerja	III	72
3.6.5	Realisasi Anggaran Per IKU	III	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pondasi bagi kelangsungan pemerintahan dan Pembangunan Nasional. Namun secara objektif, karakteristik Daerah yang dibangun di atas kemajemukan, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal. Kondisi kemajemukan masyarakat daerah yang rawan konflik dapat diminimalkan dengan kebijakan publik yang memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang tidak terlalu signifikan.

Pembangunan yang belum lagi merata yang terjadi selama ini ternyata telah menjadi pemicu penyebab konflik sosial dan menguatnya gejala disentrigrasi bangsa seperti yang terjadi di Propinsi dan Kabupaten lain hal ini bisa saja terjadi di Kabupaten Solok walaupun persatuan dan kesatuan telah terpelihara baik selama ini, pembangunan yang bersifat fisik masih memerlukan perhatian yang serius, karena pembangunan itu sendiri harus sejalan dengan pembangunan mental dan spritual sesuai dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga, tuntutan terhadap kemajuan pembangunan tidak lagi menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya sinkronisasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang diharapkan akan dapat saling menopang guna meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sementara itu pengaruh globalisasi antara lain terwujud dalam arus informasi yang begitu deras yang membawa masyarakat

kearah keterbukaan disamping berdampak positif bagi kemajuan bangsa, juga berdampak positif terhadap ketahanan Nasional.

Dengan bergulirnya era reformasi adalah merupakan perubahan secara mendasar dalam pembangunan sistem politik Nasional, perubahan tersebut lebih mengutamakan menegakkan kedaulatan rakyat, perlunya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, pembangunan di bidang politik di fokuskan untuk meningkatkan, mengembangkan budaya politik yang demokratis, penegakkan hukum dan menghormati HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada akhirnya ini pengembangan sistem politik yang demokratis telah berjalan sedemikian baik itu dapat kita lihat ditingkat pemerintahan maupun ditingkat masyarakat.

Kehadiran banyak partai politik saat ini disatu sisi menaruh harapan optimis bagi masyarakat untuk bersaing secara demokratis dan dinamis untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di legislatif, tetapi di balik semua ini terjadi pula kebingungan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya karena begitu banyak partai dan beberapa hal yang telah menjadi opini di tengah-tengah masyarakat adalah bahwa para wakil yang mereka pilih belum dapat secara utuh menyampaikan aspirasi mereka.

Organisasi Kemasyarakatan yang cenderung bertambah banyak merupakan pemusatan dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat untuk itu perlu dikembangkan komunikasi timbal balik diantara sesama ormas dan antara ormas dengan pemerintah, sehingga program dan kegiatan ormas bisa disejalkan dengan program pemerintah dan selanjutnya ormas bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2009. Diharapkan pada setiap provinsi, Kabupaten / Kota agar melakukan pembinaan terhadap ormas, orsospol yang ada di daerah dengan mengadakan kerja sama di bidang tertentu serta mengikut sertakan mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

Daerah Kabupaten Solok yang dilintasi bukit barisan yang membujur dari utara ke selatan, sehingga keadaan topografisnya sangat bervariasi mulai dari datar, landai dan curam serta pegunungan, dengan ketinggian mencapai 2.912 Meter diatas permukaan laut dan berada pada pertemuan lempeng indo australia dan Eroasia serta dilintasi patahan semangka. Kabupaten Solok karena lokasi dan kondisi geografis termasuk daerah rawan bencana antara lain banjir, tanah longsor, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik dan kebakaran maka dari itu diperlukan kewaspadaan yang tinggi dari seluruh step holder dan masyarakat Kabupaten Solok, bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana dan terkoodinir, terpadu, cepat dan tepat.

Perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya industrialisasi di daerah menuntut penyediaan bahan baku yang makin meningkat. Hal ini menimbulkan kecendrungan untuk mengekploitasi kekayaan alam yang kita miliki tidak menutup kemungkinan timbulnya kerusakan alam, untuk itu kedepan kita berharap dari setiap perizinan yang akan kita keluarkan perlu terlebih dahulu kita lakukan pengkajian yang mendalam dari aspek kerugian dan keberuntungan pada masyarakat dan daerah, kesemuanya itu disatu pihak mempunyai nilai yang positif karena dapat menunjang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun disisi lain dapat menjadi ancaman yang menimbulkan bencana yang secara alamiah tidak dapat dielakkan kecuali hanya memperkecil kemungkinan resiko akibat bencana yang ditimbulkan.

## **B. FUNGSI DAN TUGAS POKOK**

Badan Kesatuan Bangsa dan politik selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaa kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kewenangannya.

Adapun fungsi dan tugas pokok Badan Kesbangpol Kabupaten Solok sesuai Peraturan Bupati Solok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan;
  - b. Pelaksanaan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

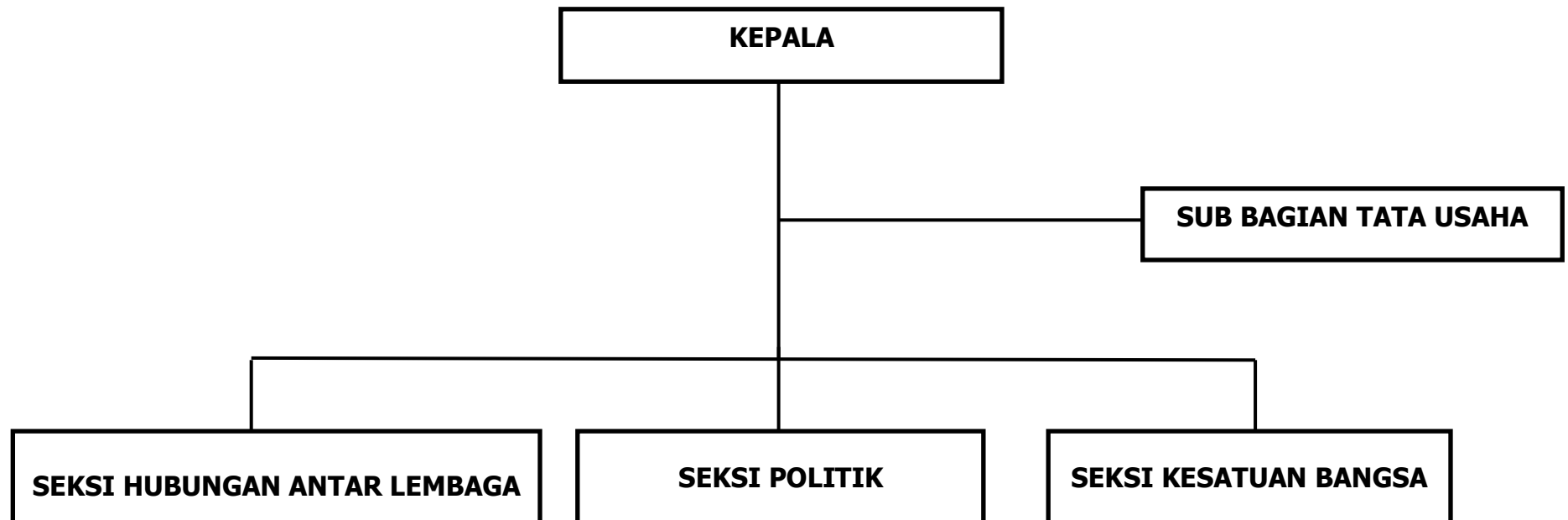
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan Kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesbangpol; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA**

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 14 Tahun 2021 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

#### **STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SOLOK**

---



Sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik keadaan Desember tahun 2023 terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**NAMA-NAMA PEGAWAI PADA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023**

No	Nama / NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan	Pendi dikan	K et
1	DONLY WANCE LUBIS, SSTP	Pembina, (IV/a)	Kepala	S.1	
2	LILI GUSWANTI, SH	Penata Tk.I, (III/d)	KTU	S.1	
3	PATRIA DJAMAL, S.Sos	Penata Tk.I, (III/d)	Kasi HAL	S.2	
4	RISWANTO, S.Sos	Penata Tk.I, (III/d)	Kasi Kesbang	S.1	
5	RIYOSNAL PUTRA, S.Kom	Penata Tk.I, (III/d)	Kasi Politik	S.1	
6	HENDRI WIRAATMAJA, S.A.P	Penata Muda, (III/a)	Staf	S.1	
7	HENGKI	Penata Muda, (III/a)	Staf	SMA	
8	JONI ANDRI	Pengatur Muda Tk.I, (II/b)	Staf	SMA	
9	BOBI HERTANTO,S.Ip	THL	Staf	S.1	
10	SRI WULANDARI, S.Pd	THL	Staf	S.1	
11	YANDA APRILTA	THL	Staf	SMK	
12	YAN EKA PUTRA	THL	Sopir	SMK	
13	BASMALA NAFOLYA	THL	Staf	S.1	
14	MIMI SYOFINA, SE	THL	Staf	S.1	
15	MEGGI MUSSATAMA	THL	Staf	SMA	
16	RUSMILA DEWI	THL	Staf	SMA	
17	EKO ADE PUTRA,SM	THL	Staf	S.1	
18	RAHMAD KUNRNIAWAN	THL	Staf	SMA	



<b>19</b>	ARE LALITA SARI	THL	Staf	S.1	
<b>20</b>	GITO FERNANDES	THL	Staf	D.3	
<b>21</b>	RONI MARTONO	THL	Staf	SMA	

#### **D. ISU STRATEGIS**

Isu - Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok sebagai berikut:

- a. Perselisihan antar nagari dan Kabupaten menyangkut tapal batas yang berdampak pada perpecahan antar masyarakat nagari perlu di antisipasi sedini mungkin dan ditangani secara adil oleh daerah.
- b. Adanya aliran kepercayaan terlarang yang masih bergerak secara diam-diam ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Organisasi sosial kemasyarakatan yang ada perlu terdata dan terpantau secara lengkap agar organisasi tersebut terbina dengan baik sehingga dapat menjadi organisasi yang menjadi partner pemerintah.
- d. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan
- e. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa
- f. Tingginya tingkat terjadinya konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Solok
- g. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pesta demokrasi

- h. Adanya ketidak stabilan harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat memicu konflik di tengah tengah masyarakat
- i. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkoba

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi keluaran (Output) dan hasil out comes/yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok mencakup Visi dan Misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

##### **1. VISI**

Visi merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasif, motifatif suatu produktif. Berangkat dari itu maka Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok adalah yaitu ” ***Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dalam membangun Masyarakat Kabupaten Solok yang Demokratis dan Berwawasan Kebangsaan***”.

##### **2. MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Solok yang demokratis melalui peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat.
- b. Memantapkan pemahaman wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan dalam tatanan sosial budaya masyarakat.
- c. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Solok terhadap potensi konflik..
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Vertikal yang ada di Daerah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Memberdayakan peran Organisasi Kemasyarakatan dalam menciptakan suasana kehidupan yang kondusif dalam masyarakat.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **a. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja birokrasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

#### **b. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok adalah merupakan penjabaran dari tujuan dengan indikator sasaran, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat Daerah
2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila

3. Meningkatnya koordinasi dengan Instansi Terkait dan partai politik serta lembaga lainnya.

## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023**

Pada dasarnya rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok selama tahun 2023. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan umpan balik dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok di tahun 2023. Penetapan Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebelum perubahan dan 2.2 setelah perubahan dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023**

Penetapan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun Anggaran : 2023

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>1.</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</li> </ul>	100%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>Administrasi keuangan perangkat daerah</li> <li>Administrasi umum perangkat daerah</li> <li>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</li> <li>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</li> </ul>	<b>Rp. 1.779.758.556,-</b>  Rp. 61.093.282,-  Rp. 1.122.326.508,- Rp. 277.194.250,- Rp. 117.143.678,-  Rp. 202.000.838,-
<b>2.</b>	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter</li> </ul>	100%	<b>Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> </ul>	<b>Rp. 500.000.120,-</b>  Rp 500.000.120,-

	dan Ideologi Pancasila	Kebangsaan			
3.	Meningkatnya koordinasi dengan Instansi Terkait dan partai politik serta lembaga lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> </ul>	100	<b>Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga melalui pendidikan politik dan pengembagn etika serta budaya politik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</li> </ul>	<b>Rp. 1.945.729.069</b>  Rp. 1.945.729.069
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Ormas/LSM aktif</li> </ul>	49.84 %	<b>Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</li> </ul>	<b>Rp. 31.130.000</b>  Rp. 31.130.000
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> </ul>	100%	<b>Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</li> </ul>	<b>Rp. 99.704.100</b>  Rp. 99.704.100

6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penanganan Konflik Sosial</li> </ul>	100%	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik daerah</li> </ul>	<b>Rp. 597.847.900,-</b>  Rp. 597.847.900,-
----	--	--	------	--	---

Jumlah Anggaran : Rp. 4.954.169.745,-

Anggaran Kegiatan : Rp. 4.954.169.745,-



**Tabel 2.2**

**PENETAPAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023**

Penetapan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun Anggaran : 2023

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</li> </ul>	100%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>Administrasi keuangan perangkat daerah</li> <li>Administrasi umum perangkat daerah</li> <li>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</li> <li>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</li> </ul>	<b>Rp. 1.769.955.529,-</b>  Rp. 84.042.034,-  Rp. 1.054.962.644,- Rp. 294.384.320,- Rp. 131.018.744,-  Rp. 205.547.787,-
2.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter</li> </ul>	100%	<b>Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> </ul>	<b>Rp. 500.000.120,-</b>  Rp. 500.000.120,-

	san kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Kebangsaan			
3.	Meningkatnya koordinasi dengan Instansi Terkait dan partai politik serta lembaga lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> </ul>	100	<b>Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga melalui pendidikan politik dan pengembanagn etika serta budaya politik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</li> </ul>	<b>Rp. 13.930.239.917</b>  Rp. 13.930.239.917
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Ormas/LSM aktif</li> </ul>	49.84%	<b>Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</li> </ul>	<b>Rp. 42.286.000</b>  Rp. 42.286.000
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial</li> </ul>	100%	<b>Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</li> </ul>	<b>Rp. 62.980.200</b>  Rp. 62.980.200

		dan Budaya			
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penanganan Konflik Sosial</li> </ul>	100%	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik daerah</li> </ul>	<b>Rp. 416.697.900,-</b>  Rp. 416.697.900,-

Jumlah Anggaran : Rp. Rp. 16.722.159.666,-

Anggaran Kegiatan : Rp. Rp. 16.722.159.666,-

### **C. PERJANJIAN KINERJA**



#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **AGUS ROSTAMDA, SH, MM**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. EPYARDI ASDA, M. Mar**

Jabatan : **BUPATI SOLOK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lempiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100
2.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100
3.	Meningkatnya koordinasi dengan Instansi Terkait dan partai politik serta lembaga lainnya.	Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100
		Persentase Ormas/LSM Aktif	49.84
		Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	100
		Persentase Penanganan Konflik Sosial	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>1.779.758.556</b>	<b>APBD</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	61.093.282	APBD
	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.122.326.508	APBD
	Administrasi umum perangkat daerah	277.194.250	APBD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	117.143.678	APBD
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	202.000.838	APBD
2.	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>500.000.120</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan	500.000.120	APBD

	pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa		
3.	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>1.945.729.069</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	1.945.729.069	APBD
4.	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>31.130.000</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	31.130.000	APBD
5.	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>99.704.100</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	99.704.100	APBD
6.	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>597.847.900</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Sosial	597.847.900	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>4.954.169.745</b>	<b>APBD</b>

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100
2.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	100

	masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Kebangsaan	
3.	Meningkatnya koordinasi dengan Instansi Terkait dan partai politik serta lembaga lainnya.	Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100
		Persentase Ormas/LSM Aktif	49.84
		Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	100
		Persentase Penanganan Konflik Sosial	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>1.769.955.529</b>	<b>APBD</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	84.042.034	APBD
	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.054.962.644	APBD
	Administrasi umum perangkat daerah	294.384.320	APBD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	131.018.744	APBD
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	205.547.787	APBD
2.	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>500.000.120</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	500.000.120	APBD
3.	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>13.930.239.917</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	13.930.239.917	APBD
4.	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>42.286.000</b>	<b>APBD</b>

	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	42.286.000	APBD
5.	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>62.980.200</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	62.980.200	APBD
6.	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>416.697.900</b>	<b>APBD</b>
	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Sosial	416.697.900	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>16.722.159.666</b>	<b>APBD</b>



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

##### **FORMAT PENJELASAN CAPAIAN MASING-MASING IKU**

##### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Indikator Kinerja 1**

**Tabel 3.1**  
**IKU 1**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Capaian</b>
1.	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100%

#### **Analisa :**

Dari data pada tabel di atas diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan pada badan kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan tabel diatas bahwa target nilai sakiptahun 2023 telah tercapai 100% dan juga

telah terealisasi 100% dan dapat di kategorikan pencapaian yang sangat baik.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal) Perkembangan Indikator Kegiatan 1**

**TABEL 3.2**  
**Perkembangan IKU 1**

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	% Capain	Target Akhir RPJMD/Renstra Target Akhir	% Capaian Renstra
1	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	%	100	100	100	100	100	100

Pada kegiatan Pemenuhan layanan kesekretariatan pada tahun 2022 telah dilaksanakan, karna faktor dari Covid 19 yang sudah menurun dan kegiatan dapat terlaksanana. Untuk kedepannya diharapkan pada tahun selanjutnya dapat dilaksanakan seperti tahun 2022, terkait pentingnya Pemenuhan layanan kesekretariatan.

Tahun 2022 kegiatan ini berjalan dengan realisasi 100%. Diharapkan dapat berjalan untuk tahun-tahun berikutnya. Sedangkan pada Tahun 2023 Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Juga Berjalan seperti yang diharapkan.

**Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota**

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat

			diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah 74,14. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan tahun 2023 sebesar 103,59% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.2**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra pada Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	74,14	76,80	103,59

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kesbangpol Kabupaten Solok**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok. Pada tahun

2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok, ditargetkan Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2023 pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok tahun 2021-2026, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.3**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%
		Target Renstra Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	
Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Nilai	100	100	100

**Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Direncanakan**

Selain tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Solok, adapun kekuatan dan kesulitan yang muncul dari dalam (internal) dan luar (eksternal) Badan Kesbangpol Kabupaten Solok itu sendiri dengan bentuk peluang dan ancaman. Akan dipaparkan permasalahan utama yang muncul dari *Internal* dan *Eksternal* Badan Kesbangpol Kabupaten Solok ke dalam bentuk *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat)* :

1. Lingkungan internal, merupakan faktor yang sebagian besar terdapat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan.

a. Kekuatan

- Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja. Adanya peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Tanggal 16 Desember 2010.
- Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan)

b. Kelemahan

- Kurangnya SDM dalam menunjang kinerja
- Kurangnya sarana dan prasarana

2. Lingkungan eksternal, merupakan faktor yang berada di luar lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi peluang dan ancaman.

a. Peluang

- Masyarakat Kabupaten Solok terus menempuh jalur yang benar dalam menjalankan hak-hak demokrasi; Wilayah Kabupaten Solok yang luas
- Jumlah penduduk yang cukup banyak
- Kabupaten Solok berada di Jalur Perlintasan Sumatera
- Kabupaten Solok berdekatan dengan Ibu kota Provinsi
- Berkembangnya Ormas dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kabupaten Solok
- Koordinasi dengan TKDPD, FORKOPIMDA, FORKOPIMCAM

b. Ancaman

- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata

- Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat
- Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah dimasyarakat
- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok

Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik selama ini belum begitu banyak tereksplorasi. Maka dari itu perlu mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga peran Badan Kesbangpol akan lebih strategis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Solok.

### **Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan Sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya berjumlah PNS 8 orang dan Tenaga Harian Lepas 13 orang. Untuk efisiennya penggunaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibutuhkan PNS sebanyak maksimal 25 orang. Dengan jumlah PNS sebanyak 8 orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 mengakibatkan kurang efisiennya kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

**Tabel 3.1.4**

**Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Realisasi (%)</b>
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.769.955.529</b>	<b>1.679.914.035</b>	<b>94.91</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>84.042.034</b>	<b>74.347.096</b>	<b>88.46</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	84.042.034	74.347.096	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>1.054.962.644</b>	<b>996.265.414</b>	<b>94.44</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	988.917.810	937.134.168	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	66.044.834	59.131.246	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>294.384.320</b>	<b>283.394.111</b>	<b>96.27</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	1.636.870	996.820	



	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	33.788.000	30.218.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	25.269.700	24.761.950	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	12 Paket	25.853.150	25.697.500	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.660.000	2.440.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	204.176.600	199.279.841	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>131.018.744</b>	<b>124.123.569</b>	<b>94.74</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	16.364.400	14.940.324	
	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	12 Laporan	114.154.344	108.683.238	
	<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>205.547.787</b>	<b>201.783.852</b>	<b>98.17</b>
	Penyediaan Jaas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	179.979.192	179.556.823	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	25.568.595	22.227.029	

Pada Tabel 3.1.4 di atas dapat dilihat untuk Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Untuk Indikator Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan hanya melaksanakan 1 program, 5 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan secara keseluruhan..

### **Rencana tindak lanjut perbaikan**

Dari uraian diatas rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun selanjutnya ditingkatkan Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesbangpol sesuai Rencana Kerja yang telah disusun.
2. Dengan adanya kekurangan Sumber daya maka diusulkan penambahan PNS untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebutuhan.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat minim aset yang bisa diberdayakan, untuk itu rencana tindak lanjut yang dilakukan mengusulkan kebutuhan aset yang kurang pada saat ini.

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Indikator Kinerja 2**

**Tabel 3.3**

**IKU 2**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Presentase koordinasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	100	100%

**Analisa :**

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan Realisasi dari Presentase koordinasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak terlaksana dikarenakan anggaran telah di pindahkan ke Program yang lebih Urgent. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan kebangsaan masyarakat Kabupaten Solok. Untuk itu penguatan ideology dan karakter kebangsaan untuk tahun berikutnya akan terus ditingkatkan pembinaan ideology Pancasila secara terstruktur, sistematis dan secara nasional.

**Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal) Perkembangan Indikator Kegiatan 2**

**TABEL 3.4**

**Perkembangan IKU 2**

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	%capain	Target Akhir RPJMD/Renstra Target Akhir	% Capaian Renstra
1	Presentase koordinasi penguatan ideology Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada kegiatan koordinasi penguatan ideology Pancasila dan karakter kebangsaan pada tahun 2022 tidak dilaksanakan karna anggaran tersebut dipindahkan pada saat perubahan untuk kegiatan

yang lebih Urgent. Untuk Tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan realisasi mencapai 100%. Pada tahun selanjutnya kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan karna pentingnya koordinasi penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan.

**Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota**

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah 74,14. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan tahun 2023 sebesar 103,59% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.2**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra pada Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	74,14	76,80	103,59

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kesbangpol Kabupaten Solok**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok, ditargetkan Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2003 pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok tahun 2021-2026, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.3**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra Periode 2023	Realisasi 2023	
Presentase koordinasi penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan	Nilai	100%	100%	100%

## **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Direncanakan**

Selain tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Solok, adapun kekuatan dan kesulitan yang muncul dari dalam (internal) dan luar (eksternal) Badan Kesbangpol Kabupaten Solok itu sendiri dengan bentuk peluang dan ancaman. Akan dipaparkan permasalahan utama yang muncul dari *Internal* dan *Eksternal* Badan Kesbangpol Kabupaten Solok ke dalam bentuk *SWOT* (*Strength, Weakness, Oportunity, Threat*) :

1. Lingkungan internal, merupakan faktor yang sebagian besar terdapat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan.
  - a. Kekuatan
    - Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja. Adanya peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Tanggal 16 Desember 2010.
    - Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan)
  - b. Kelemahan
    - Kurangnya SDM dalam menunjang kinerja
    - Kurangnya Sarana dan Prasarana
2. Lingkungan eksternal, merupakan faktor yang berada di luar lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi peluang dan ancaman.
  - a. Peluang

- Masyarakat Kabupaten Solok terus menempuh jalur yang benar dalam menjalankan hak-hak demokrasi; Wilayah Kabupaten Solok yang luas
- Jumlah penduduk yang cukup banyak
- Kabupaten Solok berada di Jalur Perlintasan Sumatera
- Kabupaten Solok berdekatan dengan Ibu kota Provinsi
- Berkembangnya Ormas dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kabupaten Solok
- Koordinasi dengan TKDPD, FORKOPIMDA, FORKOPIMCAM

b. Ancaman

- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata
- Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat
- Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah dimasyarakat
- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok

Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik selama ini belum begitu banyak tereksplorasi. Maka dari itu perlu mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga peran Badan Kesbangpol akan lebih strategis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Solok.

### **Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan Sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya berjumlah PNS 8 orang dan Tenaga Harian Lepas 13 orang. Untuk efisiennya penggunaan sumber daya



pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibutuhkan PNS sebanyak maksimal 25 orang. Dengan jumlah PNS sebanyak 8 orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 mengakibatkan kurang efisiennya kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

**Tabel 3.2.4**

**Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

No	Program / Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1.	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.120</b>	<b>495.653.500</b>	<b>99.13%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideology Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100 %</b>	<b>500.000.120</b>	<b>495.653.500</b>	<b>99.13%</b>
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, pembauran keangsaan, bieka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	300 Orang	500.000.120	495.653.500	

Pada Tabel 3.2.4 di atas dapat dilihat untuk Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok hanya melaksanakan 1

Program dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan. Pada Tabel diatas dapat dilihat kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan dengan realisasi 100%.

### **Rencana tindak lanjut perbaikan**

Dari uraian diatas rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun selanjutnya ditingkatkan Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesbangpol sesuai Rencana Kerja yang telah disusun.
2. Dengan adanya kekurangan Sumber daya maka diusulkan penambahan PNS untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebutuhan.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat minim aset yang bisa diberdayakan, untuk itu rencana tindak lanjut yang dilakukan mengusulkan kebutuhan aset yang kurang pada saat ini.

### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Indikator Kinerja 3**

**Tabel 3.5**  
**IKU 3**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Capaian</b>
1.	Persentase koordinasi peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100	100	100

### **Analisa :**

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melaksanakan kondisi peran partai politik

dengan terealisasinya Diskusi Politik pada tahun 2023. dengan adanya diskusi politik dapat dipergunakan untuk membahas permasalahan yang terjadi di kabupaten solok dengan instansi yang terkait.

**Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal) Perkembangan Indikator Kegiatan 3**

**TABEL 3.6**  
**Perkembangan IKU 3**

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	%capain	Target Akhir RPJMD/Renstra Target Akhir	% Capaian Renstra
1	Persentase koordinasi peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100	100	100	100	100	100

Pada kegiatan koordinasi peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik tahun 2022 dan 2023 di laksanakan dengan capaian hampir 100%.

**Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota**

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi

Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah 74,14. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan tahun 2023 sebesar 103,59% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra pada Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	74,14	76,80	103,59

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kesbangpol Kabupaten Solok**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok ditargetkan Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2023 pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok tahun 2021-2026, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.3**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra Periode 2023	Realisasi 2023	
Persentase koordinasi peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Nilai	100	100	100%

**Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Direncanakan**

Selain tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Solok, adapun kekuatan dan kesulitan yang muncul dari dalam (internal) dan luar (eksternal) Badan Kesbangpol Kabupaten Solok itu sendiri dengan bentuk peluang dan ancaman. Akan dipaparkan permasalahan utama yang muncul dari *Internal* dan *Eksternal* Badan Kesbangpol Kabupaten Solok ke dalam bentuk *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat)* :

1. Lingkungan internal, merupakan faktor yang sebagian besar terdapat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan.
  - a. Kekuatan
    - Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja.
    - Adanya peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 7

Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Tanggal 16 Desember 2010.

- Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan)

b. Kelemahan

- Kurangnya SDM dalam menunjang kinerja
- Kurangnya sarana dan Prasarana

2. Lingkungan eksternal, merupakan faktor yang berada di luar lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi peluang dan ancaman.

a. Peluang

- Masyarakat Kabupaten Solok terus menempuh jalur yang benar dalam menjalankan hak-hak demokrasi; Wilayah Kabupaten Solok yang luas
- Jumlah penduduk yang cukup banyak
- Kabupaten Solok berada di Jalur Perlintasan Sumatera
- Kabupaten Solok berdekatan dengan Ibu kota Provinsi
- Berkembangnya Ormas dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kabupaten Solok
- Koordinasi dengan TKDPD, FORKOPIMDA, FORKOPIMCAM

b. Ancaman

- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata
- Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat
- Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah dimasyarakat

- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok

Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik selama ini belum begitu banyak tereksplorasi. Maka dari itu perlu mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga peran Badan Kesbangpol akan lebih strategis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Solok.

### **Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan Sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya berjumlah PNS 8 orang dan Tenaga Harian Lepas 13 orang. Untuk efisiennya penggunaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibutuhkan PNS sebanyak maksimal 25 orang. Dengan jumlah PNS sebanyak 8 orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 mengakibatkan kurang efisiennya kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

**Tabel 3.3.4**

**Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Realisasi (%)</b>
1.	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik</b>	<b>100 %</b>	<b>13.930.239.917</b>	<b>13.806.344.307</b>	<b>99,11</b>
	<b>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>100 %</b>	<b>13.930.239.917</b>	<b>13.806.344.307</b>	<b>99,11</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	50 Orang	13.725.539.307	13.725.539.307	

	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	49.740.610	32.760.000	
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	154.950.000	48.045.000	

Pada Tabel 3.3.4 di atas dapat dilihat untuk Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

### **Rencana tindak lanjut perbaikan**

Dari uraian diatas rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun selanjutnya ditingkatkan Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesbangpol sesuai Rencana Kerja yang telah disusun.
2. Dengan adanya kekurangan Sumber daya maka diusulkan penambahan PNS untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebutuhan.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat minim aset yang bisa diberdayakan, untuk itu rencana tindak lanjut yang dilakukan mengusulkan kebutuhan aset yang kurang pada saat ini.

### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Indikator Kinerja 4**

**Tabel 3.7**  
**IKU 4**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Capaian</b>
1.	Persentase Ormas/LSM aktif	49.84	49.84	100%

#### **Analisa :**

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah Melaksanakan kegiatan tersebut dengan Realisasi sebesar 49.84% dengan Presentase Capaian 100%.

**Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal) Perkembangan Indikator Kegiatan 3**

**TABEL 3.8**  
**Perkembangan IKU 4**

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	%capain	Target Akhir RPJMD/Renstra Target Akhir	% Capaian Renstra
1	Persentase Ormas/LSM aktif	%	48.67	49.84	49.84	100	53.35	100%

Pada kegiatan Persentase Ormas/LSM aktif untuk tahun 2022 dilaksanakan dengan capaian 100% sedangkan untuk tahun 2023 hampir sama dengan tahun lalu dengan capain 100% dan diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahunnya dikarenakan pentingnya kegiatan tersebut.

**Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota**

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja OPD

adalah 74,14. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan tahun 2023 sebesar 103,59% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4.2**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra pada Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	74,14	76,80	103,59

#### **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kesbangpol Kabupaten Solok**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok, ditargetkan Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2023 pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok tahun 2021-2026, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4.3**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra Periode 2023	Realisasi s.d 2023	
Persentase Ormas/LSM aktif	Nilai	49.84	49.84	100

**Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Direncanakan**

Selain tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Solok, adapun kekuatan dan kesulitan yang muncul dari dalam (internal) dan luar (eksternal) Badan Kesbangpol Kabupaten Solok itu sendiri dengan bentuk peluang dan ancaman. Akan dipaparkan permasalahan utama yang muncul dari *Internal* dan *Eksternal* Badan Kesbangpol Kabupaten Solok ke dalam bentuk SWOT (*Strength, Weakness, Oportunity, Threat*) :

1. Lingkungan internal, merupakan faktor yang sebagian besar terdapat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan.
  - a. Kekuatan
    - Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja. Adanya peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Tanggal 16 Desember 2010.

- Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan)
- b. Kelemahan
- Kurangnya SDM dalam menunjang kinerja
  - Kurangnya sarana dan prasarana
2. Lingkungan eksternal, merupakan faktor yang berada di luar lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi peluang dan ancaman.
- a. Peluang
- Masyarakat Kabupaten Solok terus menempuh jalur yang benar dalam menjalankan hak-hak demokrasi; Wilayah Kabupaten Solok yang luas
  - Jumlah penduduk yang cukup banyak
  - Kabupaten Solok berada di Jalur Perlintasan Sumatera
  - Kabupaten Solok berdekatan dengan Ibu kota Provinsi
  - Berkembangnya Ormas dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kabupaten Solok
  - Koordinasi dengan TKDPD, FORKOPIMDA, FORKOPIMCAM
- b. Ancaman
- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata
  - Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat
  - Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah dimasyarakat
  - Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok

Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik selama ini belum begitu banyak



terekplorasi. Maka dari itu perlu mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga peran Badan Kesbangpol akan lebih strategis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Solok.

### **Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan Sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya berjumlah PNS 8 orang dan Tenaga Harian Lepas 13 orang. Untuk efisiennya penggunaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibutuhkan PNS sebanyak maksimal 25 orang. Dengan jumlah PNS sebanyak 8 orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 mengakibatkan kurang efisiennya kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

**Tabel 3.4.4**

#### **Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Realisasi (%)</b>
1.	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>42.286.000</b>	<b>39.294.553</b>	<b>46.31</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>	<b>49.84 %</b>	<b>42.286.000</b>	<b>39.294.553</b>	<b>46.31</b>

	<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>				
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasn Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	42.286.000	39.294.553	

Pada Tabel 3.4.4 di atas dapat dilihat untuk Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok hanya melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

#### **Rencana tindak lanjut perbaikan**

Dari uraian diatas rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun selanjutnya ditingkatkan Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesbangpol sesuai Rencana Kerja yang telah disusun.
2. Dengan adanya kekurangan Sumber daya maka diusulkan penambahan PNS untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebutuhan.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat minim aset yang bisa diberdayakan, untuk itu rencana tindak lanjut yang dilakukan mengusulkan kebutuhan aset yang kurang pada saat ini.

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Indikator Kinerja 5**

**Tabel 3.9**

**IKU 5**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Presentase koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya	100	45	45.54%

**Analisa :**

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan capaian 45.54% hal ini terkait dengan kegiatan FKUB tidak terlaksana dikarenakan belum lengkapnya administrasi kegiatan. Untuk tahun berikutnya diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan capaian 100%.

**Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal) Perkembangan Indikator Kegiatan 5**

**TABEL 3.10**

**Perkembangan IKU 5**

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	% capain	Target Akhir RPJMD/Renstra Target Akhir	% Capaian Renstra
1	Presentase koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya	%	100	100	45	45.54%	100%	100%

Pada kegiatan koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya untuk Tahun 2022 kegiatan

tersebut dilaksanakan dengan capaian 100% sedangkan untuk tahun 2023 hanya 45.54%. kegiatan tersebut tidak mencapai target yang telah di tentukan karna kegiatan FKUB tidak terlaksana sehingga terhambatnya capaian untuk kegiatan ini di tahun 2023. Dan untuk tahun yang akan datang akan dilaksanakan karna pentingnya kegiatan ini untuk menunjang kinerja pada Badan Kesbangpol.

**Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota**

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5.1**

**Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah 74,14. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan tahun 2023 sebesar 103,59% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5.2**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra pada Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	74,14	76,80	103,59

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kesbangpol Kabupaten Solok**

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok, ditargetkan Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2023 pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok tahun 2021-2026, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5.3**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra Periode 2023	Realisasi s.d 2023	
Presentase koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya	Nilai	100	45.54%	45.54%

## **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Direncanakan**

Selain tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Solok, adapun kekuatan dan kesulitan yang muncul dari dalam (internal) dan luar (eksternal) Badan Kesbangpol Kabupaten Solok itu sendiri dengan bentuk peluang dan ancaman. Akan dipaparkan permasalahan utama yang muncul dari *Internal* dan *Eksternal* Badan Kesbangpol Kabupaten Solok ke dalam bentuk *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat)* :

1. Lingkungan internal, merupakan faktor yang sebagian besar terdapat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan.
  - a. Kekuatan
    - Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja. Adanya peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Tanggal 16 Desember 2010.
    - Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan)
  - b. Kelemahan
    - Kurangnya SDM dalam menunjang kinerja
2. Lingkungan eksternal, merupakan faktor yang berada di luar lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi peluang dan ancaman.
  - a. Peluang

- Masyarakat Kabupaten Solok terus menempuh jalur yang benar dalam menjalankan hak-hak demokrasi; Wilayah Kabupaten Solok yang luas
- Jumlah penduduk yang cukup banyak
- Kabupaten Solok berada di Jalur Perlintasan Sumatera
- Kabupaten Solok berdekatan dengan Ibu kota Provinsi
- Berkembangnya Ormas dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kabupaten Solok
- Koordinasi dengan TKDPD, FORKOPIMDA, FORKOPIMCAM

b. Ancaman

- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata
- Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat
- Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah dimasyarakat
- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok

Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik selama ini belum begitu banyak tereksplorasi. Maka dari itu perlu mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga peran Badan Kesbangpol akan lebih strategis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Solok.

### **Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan Sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya berjumlah PNS 8 orang dan Tenaga Harian Lepas 13 orang. Untuk efisiennya penggunaan sumber daya



pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibutuhkan PNS sebanyak maksimal 25 orang. Dengan jumlah PNS sebanyak 8 orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 mengakibatkan kurang efisiennya kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

**Tabel 3.5.4**

**Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

No	Program / Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1.	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>62.980.200</b>	<b>28.680.000</b>	<b>45.54</b>
	<b>Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>62.980.200</b>	<b>28.680.000</b>	<b>45.54</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	100 Orang	25.600.200	900.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan, Sosial,	100 Orang	37.380.000	27.780.000	

	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
--	--	--	--	--	--

Pada Tabel 3.5.4 di atas dapat dilihat untuk Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan target realisasi mencapai 45.54%.

### **Rencana tindak lanjut perbaikan**

Dari uraian diatas rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun selanjutnya ditingkatkan Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesbangpol sesuai Rencana Kerja yang telah disusun.
2. Dengan adanya kekurangan Sumber daya maka diusulkan penambahan PNS untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebutuhan.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat minim aset yang bisa diberdayakan, untuk itu rencana tindak lanjut yang dilakukan mengusulkan kebutuhan aset yang kurang pada saat ini.

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Indikator Kinerja 6**

**Tabel 3.11**

**IKU 6**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Persentase penanganan Konflik sosial	100	100	100%

**Analisa :**

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan tersebut dan terealisasi 100%. Pada tahun 2022 Terdapat beberapa masalah konflik yang terjadi di kabupaten solok. Untuk itu di tahun 2023 Badan kesbangpol telah mengoptimalkan dan melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela Negara agar terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah – tengah masyarakat sehingga dapat menghindari konflik dengan hal tersebut.

**Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal) Perkembangan Indikator Kegiatan 6**

**TABEL 3.12**

**Perkembangan IKU 6**

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	%capain	Target Akhir RPJMD/Renstra Target Akhir	% Capaian Renstra
1	Persentase penanganan Konflik sosial	%	100	100	100	100	100	100

Pada kegiatan Penanganan Konflik sosial untuk Tahun 2022 dilaksanakan dengan capaian 100%. Sedangkan untuk tahun 2003 juga dilaksanakan dengan capaian 100%. Diharapkan untuk dapat dilaksanakan setiap tahunnya terkait pentingnya kegiatan tersebut.

**Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional/  
provinsi/ kabupaten/ kota**

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6.1**  
**Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat

			diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah 74,14. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan tahun 2023 sebesar 103,59% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6.2**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra pada Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	74,14	76,80	103,59

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kesbangpol Kabupaten Solok**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok, ditargetkan Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2023 pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok tahun 2021-2026, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6.3**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra Periode 2023	Realisasi s.d 2023	
Persentase penanganan Konflik sosial	Nilai	100	100	100

**Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Direncanakan**

Selain tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Solok, adapun kekuatan dan kesulitan yang muncul dari dalam (internal) dan luar (eksternal) Badan Kesbangpol Kabupaten Solok itu sendiri dengan bentuk peluang dan ancaman. Akan dipaparkan permasalahan utama yang muncul dari *Internal* dan *Eksternal* Badan Kesbangpol Kabupaten Solok ke dalam bentuk *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat)* :

1. Lingkungan internal, merupakan faktor yang sebagian besar terdapat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan.

a. Kekuatan

- Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja. Adanya peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Tanggal 16 Desember 2010.
- Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan)

b. Kelemahan

- Kurangnya SDM dalam menunjang kinerja
- Kurangnya Sarana dan Prasarana

2. Lingkungan eksternal, merupakan faktor yang berada di luar lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Solok serta dapat dibedakan menjadi peluang dan ancaman.

a. Peluang

- Masyarakat Kabupaten Solok terus menempuh jalur yang benar dalam menjalankan hak-hak demokrasi; Wilayah Kabupaten Solok yang luas
- Jumlah penduduk yang cukup banyak
- Kabupaten Solok berada di Jalur Perlintasan Sumatera
- Kabupaten Solok berdekatan dengan Ibu kota Provinsi
- Berkembangnya Ormas dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kabupaten Solok
- Koordinasi dengan TKDPD, FORKOPIMDA, FORKOPIMCAM

b. Ancaman

- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata
- Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat
- Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah dimasyarakat
- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok

Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik selama ini belum begitu banyak tereksplorasi. Maka dari itu perlu mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga peran Badan Kesbangpol akan lebih strategis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Solok.

**Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan Sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya berjumlah PNS 8 orang dan Tenaga Harian Lepas 13 orang. Untuk efisiennya penggunaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibutuhkan PNS sebanyak maksimal 25 orang. Dengan jumlah PNS sebanyak 8 orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 mengakibatkan kurang efisiennya kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



**Tabel 3.6.4**  
**Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan**  
**Pencapaian Target Kinerja**

No	Program / Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1.	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>416.697.900</b>	<b>308.824.473</b>	<b>74.02%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>416.697.900</b>	<b>308.824.473</b>	<b>74.02%</b>
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, tenaga kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah	54 Orang	22.500.000	16.650.000	
	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, tenaga kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah	2 Laporan	100.450.000	90.897.800	

Pada Tabel 3.6.4 di atas dapat dilihat untuk Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan realisasi 74.02%.

### **Rencana tindak lanjut perbaikan**

Dari uraian diatas rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun selanjutnya ditingkatkan Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesbangpol sesuai Rencana Kerja yang telah disusun.
2. Dengan adanya kekurangan Sumber daya maka diusulkan penambahan PNS untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebutuhan.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat minim aset yang bisa diberdayakan, untuk itu rencana tindak lanjut yang dilakukan mengusulkan kebutuhan aset yang kurang pada saat ini.

### **B. REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja.

Pada tahun 2023, pendanaan yang diterima oleh setiap program atau kegiatan yang terdapat dalam program-program pada Badan

Kesbangpol Kabupaten Solok mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai Indikator kinerja utama pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16,722,159,666,- realisasi Anggaran per indikator kegiatan sebagai berikut :

**TABEL 3.6.5**  
**REALISASI ANGGARAN PER IKU**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SOLOK**

No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Keuangan		
			Anggaran	Realisasi	Persentase%
	• Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>• Administrasi keuangan perangkat daerah</li> <li>• Administrasi umum perangkat daerah</li> <li>• Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</li> <li>• Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</li> </ul>	<b>Rp. 1.769.955.529,-</b>  Rp. 84.042.034,-  Rp. 1.054.962.644,- Rp. 294.384.320,- Rp. 131.018.744,-  Rp. 205.547.787,-	<b>Rp. 1.679.914.035,-</b>  Rp. 74.347.096,-  Rp. 996.265.414,- Rp. 283.394.111,- Rp. 124.123.562,-  Rp. 201.783.852	<b>94.91%</b>  88.46%  94.44% 96.27% 94.74%  98.17%
	• Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi	<b>Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</li> </ul>	<b>Rp. 500.000.120,-</b>  Rp. 500.000.120,-	<b>Rp. 495.653.500,-</b>  Rp. 495.653.500,-	<b>99.13%</b>  99.13%

	Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> </ul>	<p><b>Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga melalui pendidikan politik dan pengembanagn etika serta budaya politik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</li> </ul>	<p><b>Rp. 13.930.239.917,-</b></p> <p>Rp. 13.930.239.917,-</p>	<p><b>Rp. 13.806.344.307,-</b></p> <p>Rp. 13.806.344.307,-</p>	<p><b>99.11%</b></p> <p>99.11%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Ormas/LSM aktif</li> </ul>	<p><b>Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan</li> </ul>	<p><b>Rp. 42.286.000,-</b></p>	<p><b>Rp. 39.294.553,-</b></p>	<p><b>92.93%</b></p>

		pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp. 42.286.000,-	Rp. 39.294.553,-	92.93%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> </ul>	<b>Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</li> </ul>	<b>Rp. 62.980.200,-</b>  Rp. 62.980.200,-	<b>Rp. 28.680.000,-</b>  Rp. 28.680.000,-	<b>45.54%</b>  45.54%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penanganan Konflik Sosial</li> </ul>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik daerah</li> </ul>	<b>Rp. 416.697.900,-</b>  Rp. 416.697.900,-	<b>Rp. 308.424.473,-</b>  Rp. 308.424.473,-	<b>74.02%</b>  74.02%
<b>JUMLAH</b>			<b>17.722.159.666,-</b>	<b>16.358.310.868</b>	<b>97.82%</b>

Semua kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Solok Berjalan dengan semestinya. Namun ada 1 Sub kegiatan yang tidak terlaksana karna kelengkapan administrasi kegiatan yang belum lengkap. Dalam segi anggaran, capaian realisasi anggaran enam Program yang dimiliki Badan Kesbangpol pada tahun 2023 mencapai 97.82% walaupun ada satu Kegiatan yang tidak jalan. Pada tabel 3.5, dipaparkan pencapain realisasi anggaran masing-masing kegiatan. Hampir keseluruhan, pencapaian realisasi anggaran masing-masing kegiatan mencapai 100%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari semangat kerja dan kebersamaan seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Semoga pencapaian kinerja ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Arosuka, Februari 2023

**BADAN KESBANGPOL KAB. SOLOK**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
KABUPATEN  
KEPALA,**  
  
**DONLY WANCE LUBIS, SSTP**  
Pembina

NIP. 19831102 200212 1 001